

OPTIMALISASI POTENSI *E-COMMERCE* DI KABUPATEN SORONG: PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KETERLIBATAN UMKM LOKAL

Selvia Tamaya¹, Arie Purnomo^{2*}, Awal Fikri³.

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

*Korespondensi: arie.170182@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze optimizing the government's role in increasing the involvement of local MSMEs. This research uses the concepts of innovation, MSME economics, public policy, and social media. This research used a descriptive qualitative approach with five informants. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, literature review. The research results show, first, the government as a regulator, namely the designer or maker of regulations regarding local MSMEs. Second, the government as a facilitator, namely those who facilitate & fund local MSMEs in developing their businesses according to the stipulated provisions. Third, the government and local MSME actors as accelerators where they are involved in implementing the designs and regulations that have been determined. The Government of Sorong Regency, Southwest Papua, allocated IDR 7 billion from the 2023 General Allocation Fund and Special Autonomy to empower Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the region. Many local MSMEs do not have an adequate understanding of the basic concepts of e-commerce. They don't understand how e-commerce functions, such as creating and managing an online store. Lack of technical skills is also an obstacle in adopting e-commerce.

Keywords: Role; Government; e-commerce, MSMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis optimalisasi peran pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan UMKM lokal. Dalam penelitian ini menggunakan konsep inovasi, ekonomi UMKM, kebijakan publik, dan media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan berjumlah lima orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pemerintah sebagai regulator yakni perancang atau pembuat peraturan mengenai UMKM lokal. Kedua, pemerintah sebagai fasilitator yakni mereka yang memfasilitasi & mendanai pelaku UMKM lokal dalam mengembangkan usahanya sesuai ketentuan yang ditetapkan. Ketiga, pemerintah dan pelaku UMKM lokal sebagai akselerator di mana mereka yang terlibat pelaksanaan rancangan dan peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, mengalokasikan dana sebesar Rp7 miliar dari Dana Alokasi Umum dan Otonomi Khusus 2023 untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Banyak UMKM lokal tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dasar *e-commerce*. Mereka kurang paham bagaimana *e-commerce* berfungsi, seperti pembuatan dan pengelolaan

toko online. Kurangnya keterampilan teknis juga menjadi kendala dalam mengadopsi *e-commerce*.

Kata kunci: Peran; Pemerintah; e-commerce; UMKM

Pendahuluan

Perdagangan elektronik adalah contoh kemajuan teknologi informasi, artinya transaksi bisnis tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional, dan pembeli harus bertransaksi langsung dengan penjual atau menggunakan uang tunai. Penjual diwakili oleh sistem yang melayani pembeli, namun mereka berkomunikasi secara online melalui jaringan komputer. Oleh karena itu, ekonomi digital memerlukan infrastruktur sistem yang dapat menjamin keamanan transaksi. Hal ini tercermin dari munculnya berbagai bentuk e-commerce, antara lain: ritel, lelang produk, penyediaan layanan. Akibatnya, toko tradisional tergantikan oleh toko elektronik yang dikenal dengan nama toko virtual, pasar digital, e-mall, toko online, dan lain-lain.

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2022 dari Goggle, Tamasek, Bain & Co tentang ekonomi digital Asia Tenggara. Laporan tahunan ini menunjukkan pertumbuhan di berbagai sektor seperti e-commerce, transportasi dan pesan-antar makanan, media digital, layanan perjalanan online, layanan keuangan digital, dan keuangan swasta. Bahkan diperkotaan, ada tiga sektor yang memiliki penetrasi pengguna digital tertinggi dan hampir dimanfaatkan sepenuhnya: e-commerce, transportasi, dan pesan-antar makanan. Masyarakat di kota-kota ini akan mulai membeli mobil dan bahan makanan secara online atau melalui e-commerce pada tahun 2022. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa konsumen digital Indonesia lebih sering menggunakan layanan media online dibandingkan rata-rata konsumen di Asia Tenggara, namun dalam jangka waktu yang lebih singkat. GMV media online diperkirakan akan mencapai \$6,4 miliar pada tahun 2022, meningkat sebesar 5% dibandingkan tahun 2021, dan mencapai \$11 miliar pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan setara dengan 19%. Untuk mengarahkan perkembangan tersebut ke arah yang benar, perlu diingat bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Dengan kata lain, tanpa pemerintah maka kedudukan pemerintah dalam masyarakat akan berubah atau bahkan hilang. Selain itu, kelainan juga dapat terjadi di masyarakat, seperti

dominasi pengusaha, hilangnya kehadiran pemerintah, dan ketidakstabilan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan ini memerlukan keterlibatan pemerintah, yang akan tercermin dalam kebijakan dan peraturan terkait perubahan tersebut.

Di era digital ini perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berbisnis. *E-commerce*, atau perdagangan elektronik, telah menjadi salah satu bentuk utama dari aktivitas perdagangan di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, namun juga terlihat mendominasi di wilayah-wilayah pedesaan dan kabupaten. Sebagai salah satu wilayah di provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor *e-commerce*. Meskipun potensinya besar, keterlibatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) lokal dalam ranah *e-commerce* masih terbatas. Faktor-faktor seperti keterbatasan teknologi, keterampilan digital, dan kurangnya pemahaman tentang manfaat *e-commerce* menjadi tantangan utama yang dihadapi UMKM di kabupaten sorong.

Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mengoptimalkan potensi *e-commerce* di kabupaten sorong. Dengan memahami peran pemerintah sebagai fasilitator dan penggerak utama dalam memajukan sektor ekonomi lokal, maka penting untuk meneliti strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan UMKM dalam ranah *e-commerce*. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM serta menganalisis efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah setempat, maka dapat dikembangkan solusi-solusi konkret untuk memperkuat partisipasi UMKM dalam *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan membangun fondasi yang kuat bagi pengembangan *e-commerce* di Kabupaten Sorong. Di Kabupaten Sorong UMKM yang telah terdaftar berjumlah 6.000 lebih, sedangkan UMKM pusat yang terdata berjumlah lebih dari 10.000.

UMKM di Kabupaten Sorong yang berjumlah 6.000 lebih telah disurvei dan diberikan bantuan oleh pemerintah daerah, selain itu UMKM tersebut juga diberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan membuat kue dan kerajinan. Di Kabupaten Sorong, UMKM terdiri dari berbagai macam bidang usaha termasuk koperasi dan terdapat bidang usaha kuliner seperti kue dan berbagai jenis makanan (sumber: dinas perindagkop kab. sorong). Terdapat kelompok

UMKM yaitu UKM nusantara yang tersebar di distrik Salawati, Aimas dan Mayamuk. UMKM yang terbanyak terletak di Aimas, Mariat, Mayamuk, dan salawati. Jumlah terakhir yang didata dari Pusat Usaha Layanan Terpadu (PLUT) per tahun 2023 sebanyak 1.426 UMKM yang aktif dari segi produksi maupun non produksi (sumber:dinas perindagkop kab. sorong). Peraturan perundang-undangan terkait UMKM nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, standar, lingkungan usaha yang berkembang, perkembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, pengaturan kemitraan dan pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dan perilaku manusia melalui analisis konteks dan isi data kualitatif. Metode penelitian kualitatif cenderung fokus pada interpretasi makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari situasi atau fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif biasanya berupa teks, gambar, suara, atau materi visual lainnya. Melibatkan sejumlah instansi terkait dan pelaku UMKM. Fokus dalam penelitian ini ialah peran pemerintah kabupaten sorong dalam melibatkan UMKM lokal dalam ranah *e-commerce*. Adapun rancangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penyusunan proposal penelitian, mengobservasi lokasi, melampirkan surat permohonan izin penelitian, pengambilan data, melakukan wawancara serta dokumentasi.

Hasil Penelitian

Peran Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Potensi E-commerce Di Kabupaten Sorong

Perkembangan inovasi perdagangan elektronik (e-commerce) kini merambah ke banyak bidang kehidupan, khususnya perekonomian. Dalam perkembangannya, e-commerce telah berperan penting pada UMKM lokal khususnya di kabupaten Sorong. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 Undang-undang tersebut mendefinisikan usaha mikro sebagai suatu usaha milik orang perseorangan dan/atau perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur

dalam Undang-undang, badan usaha ditetapkan sebagai badan usaha produktif yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan menengah atau besar, swasta atau pemerintah, dikuasai oleh anak perusahaan atau anak perusahaan, dan memenuhi kriteria usaha kecil. Perusahaan yang mandiri dan produktif.

Di Kabupaten Sorong sudah terdata 6.000 lebih UMKM yang sudah pernah disurvei dan diberikan bantuan dan pelatihan. UMKM yang terbanyak terletak di Aimas, Mariat, Mayamuk, dan salawati. Jumlah terakhir yang di data dari Pusat Usaha Layanan Terpadu (PLUT) per tahun 2023 sebanyak 1.426 UMKM yang aktif dari segi produksi maupun non produksi. Penerapan *e-commerce* di kabupaten sorong mengalami perkembangan, dimulai dengan dibentuknya kelompok kecil UMKM seperti UKM Nusantara. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan narasumber sekretaris Dinas Perindagkop menyatakan bahwa:

“E-commerce sendiri sebenarnya sudah punya terobosan, di awal tahun 2022 dan sudah dibentuk kelompok-kelompok kecil per wilayah yakni UKM Nusantara dan sekarang sudah cukup berkembang. Awalnya itu hanya kelompok kecil dan sekarang sudah merekrut 200 UMKM khusus di aimas saja dan itu di luar distrik lain. Kita juga sudah memfasilitasi untuk e commerce seperti contoh kita yang membuat link Marketplace dan kurang lebih ada 800-an pengguna untuk Marketplace. Contoh produk yang sudah berkembang yakni ada wedang jahe yang tembus ke pivot, mi sagu yang sudah masuk Bintuni dan ada keripik Aria yang sudah tembus pasar nasional.”

Dari pertanyaan di atas dapat diketahui bahwa penerapan *e-commerce* di Kabupaten Sorong mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai dengan dibentuknya kelompok kecil UMKM seperti UKM Nusantara. Dengan difasilitasinya platform *e-commerce* para pelaku UMKM, kini produk mereka telah dikenal di berbagai kalangan masyarakat hingga di luar daerah. Hal ini merupakan salah satu contoh berhasilnya penerapan *e-commerce* bagi para UMKM lokal. Meskipun ada kemajuan dan inisiatif seperti pembentukan kelompok-kelompok kecil seperti UKM Nusantara dan adopsi *e-commerce* oleh beberapa UMKM, namun hal ini tidak menjamin bahwa seluruh pelaku UMKM lokal di kabupaten sorong telah mengadopsi *e-commerce*.

Pemerintah Kabupaten Sorong juga mendorong pelaku Asosiasi Nusantara UMK/UMKM untuk menciptakan peluang bagi orang asli Papua yang tidak memiliki kemampuan untuk berusaha di bidang UMKM. Asosiasi tersebut memiliki visi dan misi bersama untuk menciptakan UMKM yang profesional dan cerdas. Tak berhenti pada pendirian asosiasi, Pemerintah Kabupaten Sorong pun memberikan apresiasi atas kehadiran asosiasi tersebut. Menurut Pejabat Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, hal ini penting karena UMKM merupakan perekonomian daerah yang lebih tahan terhadap kondisi ekonomi global. Maka dari itu, dengan membentuk asosiasi, pelaku UMKM di Kabupaten Sorong dapat menciptakan kesempatan baru untuk mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan global. Kehadiran asosiasi ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mewujudkan ketahanan ekonomi di wilayah Sorong. Selain itu, asosiasi tersebut juga dapat membentuk jaringan dan kolaborasi antar pelaku UMKM, sehingga dapat saling menguntungkan dalam pengembangan usahanya

Beberapa faktor mempengaruhi tingkat adopsi *e-commerce* di antaranya adalah tingkat kesadaran digital, aksesibilitas infrastruktur internet, kesiapan dari sisi teknis di kalangan UMKM, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung. Selain itu, tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang manfaat *e-commerce* atau keterbatasan sumber daya juga dapat menjadi hambatan bagi beberapa UMKM untuk mengadopsi platform *e-commerce*. Meskipun demikian, langkah-langkah seperti penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis dapat membantu dalam meningkatkan adopsi *e-commerce* di kalangan UMKM di Kabupaten Sorong. Ini penting karena *e-commerce* dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan akses pasar, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan bisnis bagi UMKM.

Pemerintah Kabupaten Sorong memfokuskan upayanya pada pengembangan UMKM dengan modal usaha di bawah lima miliar, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya mendukung sektor UMKM yang lebih rentan. Terdapat beberapa tahapan strategis yang diimplementasikan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelaku usaha lokal. Tahapan ini meliputi pelatihan sesuai kebutuhan, pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), bimbingan teknis tentang kurasi produk dan pemasaran, serta sosialisasi tentang

pentingnya legalitas usaha. Pendekatan yang diambil mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan keterampilan melalui pelatihan, hingga dukungan dalam pemasaran dan legalitas usaha. Hal ini menunjukkan pendekatan yang holistik dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Pemerintah Kabupaten Sorong juga melakukan kerja sama dengan pihak terkait, seperti kelurahan distrik, untuk memberikan himbauan dan dukungan terhadap pelaku UMKM. Ini menunjukkan upaya kolaboratif dalam memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang diperlukan dari berbagai pihak.

Di Kabupaten Sorong adopsi e-commerce oleh pelaku UMKM berada di atas rata-rata, dengan lebih dari satu. 400 UMKM berpartisipasi aktif. Dari jumlah tersebut, sekitar 40% menggunakan media sosial sebagai platform e-commerce. Media sosial merupakan media di Internet yang memungkinkan penggunanya mengekspresikan diri, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lain serta membentuk ikatan sosial virtual (Nasrullah, 2015). Platform media sosial yang populer antara lain Facebook, WhatsApp, dan Instagram, namun yang paling banyak digunakan adalah Facebook Marketplace. Namun kendala-kendala berikut ini jelas masih perlu diatasi: Contohnya termasuk kurangnya kesadaran akan manfaat e-commerce, keterbatasan sumber daya, dan tantangan teknis dan administratif dalam penerapan platform e-commerce.

Kebijakan Dan Strategi Pemerintah Kabupaten Sorong Dalam Meningkatkan Keterlibatan Umkm Dalam Ranah E-commerce

Kebijakan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan ekonomi daerah. Melalui penyaluran dana yang cukup, pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sorong diharapkan dapat terdongkrak, dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari adanya program pemberdayaan ini. Pemerintah Kabupaten Sorong menyadari pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan bisnis secara *online*. Oleh karena itu, mereka mengadakan program pendidikan dan pelatihan khusus yang dirancang untuk memberikan pemahaman tentang *e-commerce* dan meningkatkan keterampilan yang diperlukan bagi para pelaku UMKM. program atau inisiatif yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM dapat berjalan jika adanya pelatihan yang disertai pembiayaan pada pelaku UMKM. Untuk

mendorong adopsi *e-commerce* oleh UMKM, pemerintah Kabupaten Sorong menyediakan insentif dan dukungan keuangan. Pemberian subsidi atau bantuan dana untuk pengembangan infrastruktur teknologi yang diperlukan. Pendekatan yang diambil oleh pihak yang bersangkutan menekankan pentingnya kombinasi antara pelatihan keterampilan dan penyediaan dana pembiayaan. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengembangkan UMKM lokal di kabupaten sorong.

Pemerintah berperan sebagai regulator. Pemerintah Kabupaten Sorong bertanggung jawab untuk merancang kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Kebijakan ini meliputi berbagai aspek seperti kemudahan perizinan usaha, perlindungan hak-hak konsumen, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi yang menyederhanakan prosedur perizinan dan memperkenalkan program pelatihan serta bantuan teknis bagi pelaku UMKM. Regulasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari kualitas produk, keselamatan pangan, hingga kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator. Pemerintah menciptakan berbagai platform pemasaran dan promosi untuk UMKM lokal. Melalui pameran UMKM, bazaar lokal, dan Marketplace Online, pemerintah memberikan ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen yang lebih luas. Program "Sorong Expo" dan "Pasar Rakyat" adalah contoh inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan produk lokal serta meningkatkan visibilitas UMKM di pasar regional dan nasional.

Pemerintah dan pelaku UMKM lokal berperan sebagai akselerator. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang mendorong UMKM untuk tumbuh lebih cepat. Program ini mencakup pelatihan intensif, mentoring bisnis, dan bantuan teknis yang dirancang untuk membantu UMKM mengatasi tantangan dan mengeksplorasi peluang pasar yang lebih luas. Pelaku UMKM lokal, sebagai penerima program akselerasi, berperan dalam mengikuti pelatihan dan memanfaatkan dukungan yang diberikan. Dengan keterlibatan UMKM lokal mereka dapat menerapkan pengetahuan baru, melakukan inovasi, dan meningkatkan strategi bisnis mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber konsultan bidang kelembagaan pusat layanan usaha terpadu menyatakan bahwa:

“Strategi untuk meningkatkan dan mengembangkan pelaku usaha lokal khususnya di kabupaten ada beberapa tahapan. Pertama ada pelatihan, jadi kita memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian pelaku usaha tersebut. Kemudian pendampingan, di kantor PLUT (pusat layanan usaha terpadu) ini sendiri berfungsi untuk mendampingi dan sebagai tempat konsultasi bagi pelaku usaha sesuai dengan bidangnya. Adapun pelaksanaan bimtek ringan tentang kurasi produk dan pemasaran dengan melibatkan pertemuan kelompok UMKM di setiap wilayah kabupaten sorong, serta sosialisasi dan bermitra dengan beberapa kelurahan distrik untuk memberikan himbauan terhadap pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas bagi pelaku usaha.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pemerintah Kabupaten Sorong memfokuskan upayanya pada pengembangan UMKM dengan modal usaha di bawah 5 miliar, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya mendukung sektor UMKM yang lebih rentan. Terdapat beberapa tahapan strategis yang diimplementasikan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelaku usaha lokal. Tahapan ini meliputi pelatihan sesuai kebutuhan, pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), bimbingan teknis tentang kurasi produk dan pemasaran, serta sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha. Pendekatan yang diambil mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan keterampilan melalui pelatihan, hingga dukungan dalam pemasaran dan legalitas usaha.

Kendala Utama Yang Dihadapi Oleh Umkm Lokal Dalam Mengadopsi Dan Memanfaatkan E-commerce Di Kabupaten Sorong

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong yang sudah menggunakan *e-commerce* telah berhasil memperluas jangkauan produk mereka, terutama melalui platform media sosial. Meskipun begitu, terdapat kendala yang dihadapi oleh sebagian pelaku UMKM, khususnya mereka yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). selain itu, sebagian pelaku UMKM OAP mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, termasuk internet yang stabil dan perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis *e-commerce*. Meskipun ada kendala dalam menjual produk secara online, sebagian besar dari mereka sudah memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk transaksi pembelian, Ini menunjukkan

bahwa mereka terbuka terhadap teknologi pembayaran modern dan siap untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut.

Bagi sebagian besar UMKM, konsep ini masih terasa asing dan tabu. Tak hanya itu, terdapat pula tantangan dalam hal infrastruktur logistik. Di Kabupaten Sorong masih terkendala dalam hal distribusi barang. Bagaimana produk-produk lokal yang dipasarkan melalui *e-commerce* dapat diantarkan dengan cepat dan efisien ke tangan konsumen, terutama mereka yang berada di luar kota. Banyak UMKM lokal tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dasar *e-commerce*. Mereka kurang paham bagaimana *e-commerce* berfungsi, seperti pembuatan dan pengelolaan toko online. Kurangnya keterampilan teknis juga menjadi kendala dalam mengadopsi *e-commerce*. Banyak pengusaha tidak terbiasa dengan penggunaan perangkat lunak atau platform *e-commerce*, serta tidak memahami teknologi yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis online dengan efisien. Secara keseluruhan, kurangnya keterampilan digital keterbatasan, infrastruktur logistik dan distribusi menjadi hambatan yang signifikan bagi UMKM lokal di Kabupaten Sorong dalam mengadopsi *e-commerce*. Upaya untuk meningkatkan literasi digital dan menyediakan pelatihan yang sesuai membantu mengatasi hambatan ini dan meningkatkan partisipasi UMKM lokal dalam ekonomi digital. serta keterbatasan infrastruktur logistik dan distribusi menjadi hambatan yang signifikan bagi UMKM lokal di Kabupaten Sorong dalam mengadopsi *e-commerce*.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan narasumber pelaku UMKM menyatakan bahwa:

“Sebagai UMKM lokal, kami sering mengalami kesulitan dalam mengirimkan produk kami kepada pelanggan di luar wilayah lokal. Biaya pengiriman yang tinggi dan waktu pengiriman yang lama sering menjadi hambatan bagi kami dalam bersaing di pasar *e-commerce* yang semakin kompetitif. Kami mencoba untuk menangani tantangan ini dengan berbagai cara. Beberapa dari kami menjalin kemitraan dengan penyedia jasa logistik lokal untuk mendapatkan tarif pengiriman yang lebih terjangkau. Namun, masih ada kendala terkait dengan jangkauan layanan logistik, terutama untuk pengiriman ke luar daerah.”

Berdasarkan wawancara di atas sebagian besar UMKM lokal menghadapi kesulitan dalam mengirimkan produk mereka kepada pelanggan di luar wilayah lokal. Tantangan ini

disebabkan oleh biaya pengiriman yang tinggi dan waktu pengiriman yang lama, yang menjadi hambatan dalam bersaing di pasar e-commerce yang semakin kompetitif. Salah satu strategi yang diambil adalah dengan menjalin kemitraan dengan penyedia jasa logistik lokal untuk mendapatkan tarif pengiriman yang lebih terjangkau. Meskipun demikian, masih ada kendala terkait dengan jangkauan layanan logistik, terutama untuk pengiriman ke luar daerah. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut dalam pengembangan infrastruktur logistik dan distribusi di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Peningkatan e-commerce jelas mampu mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini menunjukkan keunggulan apa yang ditawarkan bisnis *e-commerce* kepada konsumen dibandingkan dengan belanja ritel tradisional. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator, regulator dan fasilitator terhadap pertumbuhan UMKM di wilayah Sorong. Mencari solusi atas permasalahan tersebut sangat membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan e-commerce, pemangku kepentingan ekonomi, bahkan dukungan masyarakat. Bagi pemerintah sebagai regulator, promotor dan fasilitator, untuk membangun dan memperkuat landasan hukum bagi perlakuan yang sama terhadap pelaku ekonomi *offline* dan *online*, dan untuk memperkuat pelaku ekonomi lokal, termasuk produk lokal dan UMKM. Konteks Perlindungan Konsumen *e-commerce* diharapkan dapat mendorong kemajuan UMKM Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas produk dan memperdalam optimalisasi pemasaran dengan memperkuat keterampilan dan kemampuan melalui pemasaran elektronik dan pelatihan bisnis digital untuk memastikan keberlanjutan bisnis yang ada. Peran pemerintah dalam hal ini mencakup inovasi produk untuk tidak hanya mendorong standarisasi produk tetapi juga mendukung pengembangan UMKM menuju inovasi yang lebih besar.

Daftar Pustaka

Ade, Resalawati. (Mei,2011). *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Amanda, I. S., Shihabudin, M., Jaya, B. P. M., & Fasyehhudin, M. 2022. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional*. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 2(1), 13-19.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. 2018, *Desain Penelitian. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Sage publication.

Dinas Perindagkop Kabupaten Sorong Gelar Showroom Bangkitkan Semangat UMKM | kumparan.com

Hanny, R., Syah, A., & Novita, D. 2020. *Analisis Penggunaan E-Commerce Terhadap Peningkatan pendapatan Umkm Kuliner Kecamatan Sawangan-Depok*. Journal Of Management, Business And Education, 7(1), 56-68.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3180/dukungan-pemerintah-untuk-mendorong-umkm-go-digital-dan-go-global>

<https://investor.id/business/264305/peran-penting-ecommerce-bumn-dan-pemerintah-untuk-kelangsungan-umkm>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/20/ini-kendala-usaha-e-commerce-di-indonesia-menurut-survei-bps>

<https://dailysocial.id/post/upaya-digitalisasi-umkm-daerah>

InfoPublik - UMKM dan UKM di Kabupaten Sorong Kurang Lebih 2.000 Unit.

Maharani, A., & Nurlukman, A. D. 2023. *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Melalui Sosial Media Dan E-Commerce Di Kota Tangerang*. Sebatik, 27(1), 333-343.

Munzir, M. 2023. *Tingkat Pengalaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Sosialisasi Sak Emkm Terhadap Pemahaman Sak Emkm (Studi Umkm Pada Kabupaten Sorong)*. Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi, 10.

Nurjaman, K. 2022. *Pemberdayaan E-Commerce di Kalangan Pelaku UMKM di Indonesia*. Jurnal Abdimas Peradaban, 3(1), 34-40.

Patton, M. Q. 2015. *Metode Penelitian & Evaluasi Kualitatif: Mengintegrasikan Teori Dan Praktik*. Sage publication.

Regita Yessy Nicky Destiana, 2019 *Peran Pemerintah Dalam Perkembangan Startup Teknologi E-commerce Di Surabaya : Studi Kasus Startup Alidien*. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga.

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung; Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Pengertian, Karakteristik dan Jenis Kajian Pustaka